

**PENGARUH PERHUTANAN SOSIAL  
TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT  
SEKITAR HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) SOLOK RADJO  
DI KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Geografi pada Fakultas Ilmu  
Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh  
FAHILA FITRIANI  
NIM 18136103

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI  
DEPARTEMEN GEOGRAFI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2023**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Judul** : Pengaruh Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan Kemasyarakatan (HKm) Solok Radjo di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

**Nama** : Fahila Fitriani

**NIM / TM** : 18136103 / 2018

**Program Studi** : Geografi

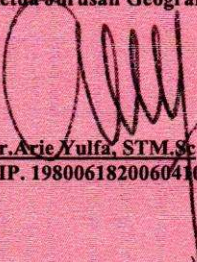
**Jurusan** : Geografi

**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2023

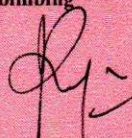
Disetujui Oleh

**Ketua Jurusan Geografi**



**Dr. Arie Yulfa, STM, Sc**  
NIP. 198006182006041003

**Pembimbing**



**Sri Mariya, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 198805032015042003

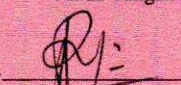


**PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Nama : Fahila Fitriani  
TM/NIM : 2018/18136103  
Program Studi : Geografi  
Jurusan : Geografi  
Fakultas : Ilmu Sosial


Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi  
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Rabu, Tanggal Ujian 14 Desember 2022 Pukul 09.40 - 10.40 WIB  
dengan judul

**Pengaruh Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan  
kemasyarakatan (HKm) Solok Radjo di Kecamatan Lembah Gumanti  
Kabupaten Solok**

Padang, Januari 2023

Tim Penguji :	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	: Sri Mariya, S.Pd, M.Pd	1. 
Anggota Penguji	: Dr. Iswandi U, S.Pd, M.Si	2. 
Anggota Penguji	: Risky Ramadhan, S.Pd, M.Si	3. 

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP

  
**Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum**  
**NIP. 196102181984032001**



**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**JURUSAN GEOGRAFI**

Jalan. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang – 25131 Telp 0751-7875159

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fahila Fitriani**  
NIM/BP : **18136103/2018**  
Program Studi : **Geografi**  
Jurusan : **Geografi**  
Fakultas : **Ilmu Sosial**

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul :

**“Pengaruh Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan Kemasyarakatan (HKm) Solok Radjo di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh,  
**Ketua Jurusan Geografi**

**Dr. Arie Yulfa, ST M.Sc**  
**NIP. 198006182006041003**

Padang, Januari 2023  
**Saya yang menyatakan**



**Fahila Fitriani**  
**NIM. 18136103**

## ABSTRAK

**Fahila Fitriani.2022.** “Pengaruh Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan Kemasyarakatan (HKm) Solok Radjo di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. *Skripsi*.Program Studi Geografi. Jurusan Geografi.Universitas Negeri Padang”

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai Perhutanan Sosial dan menganalisis pengaruh pemberian izin perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat di sekitar Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Dengan adanya perhutanan sosial ini masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang dihasilkan oleh hutan namun dengan tetap menjaga ekologi hutan itu sendiri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan cara penyebaran kuisioner di lokasi penelitian kepada 45 responden yang merupakan masyarakat yang berdomisili di Nagari Air dingin Kecamatan Lembah Gumanti yang terdaftar sebagai anggota dari Hutan Kemasyarakatan Solok Radjo. Dengan Teknik pengumpulan data observasi lapangan dan juga kuisioner untuk mengukur pengetahuan masyarakat dengan dengan skala guttman menggunakan analisis deksirptif setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dan membandingkan pendapatan masyarakat sebelum dan setelah adanya perhutanan sosial menggunakan Uji *Paired Sample T Test*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang mengenai perhutanan sosial dengan persentase 44.8% sedangkan responden memiliki tingkat pengetahuan baik hanya 17.8% dan responden memiliki pengetahuan cukup dan 37.8% responden. Untuk tujuan kedua hasil penelitian menunjukkan bahwa program perhutanan sosial terbukti memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat sekitar hutan kemasayakatan Solok Radjo. Dapat dilihat bahwa pendapatan masyarakat meningkat setelah adanya program perhutanan sosial ini dan dari hasil uji *Paired Sample T Test* memiliki t-hitung yang lebih besar dari t-tabel, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yaitu  $5.117 > 2.015$ . Dengan adanya program perhutanan sosial diharapkan dapat menjaga lingkungan ekologi hutan namun tetap memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan dengan baik.

Kata Kunci: Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan, Pendapatan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan Kemasyarakatan (HKm) Solok Radjo di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Science (S.Si) pada program Strata-1 di Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta dan keempat saudara penulis atas motivasi, doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
2. Bapak Dr. Arie Yulfa, ST., M.Sc, selaku Kepala Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Sri Mariya, S.Pd, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Bapak Dr. Iswandi, M.Si dan Bapak Risky Ramadhan, S.Pd., M.Si, selaku Dosen Penguji penulis.
5. Seluruh Dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Bapak Tito Tri Putra, S.Hut, M.Si dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Staff Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang selalu memberikan ilmu,informasi,pendampingan dan motivasi kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dan pertolongan maupun motivasi kepada penulis. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak sempat saya sebutkan.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Penulis,

Januari 2023

# DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah .....	7
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian .....	8
1.6. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II KAJIAN TEORI .....	10
2.1. Hutan.....	10
2.2. Perhutanan Sosial.....	16
2.3. Hutan Kemasyarakatan .....	23
2.4. Pendapatan Masyarakat.....	30
2.5. Penelitian Yang Relevan.....	35
2.6. Kerangka Konseptual.....	37
BAB III METODOLOGIPENELITIAN .....	39
3.1 Metode Penelitian .....	40
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	40
3.3 Populasi dan Sampel .....	41
3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.5 Instrumen Penelitian .....	44
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	49
4.1 Hasil Penelitian .....	49
4.2 Pembahasan.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81



5.1	Kesimpulan .....	81
5.2	Saran .....	81
	DAFTAR PUSTAKA .....	82
	LAMPIRAN.....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Perhutanan Sosial .....	20
Gambar 2. Kerangka konseptual.....	39
GGambar 3.Peta Areal Kerja Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KSU Solok Radjo.....	52
Gambar 4 Peta Pemanfaatan Lahan Area kerja Hutan Kemasyarakatan KSU Solok Radjo .....	53
Gambar 5 Hasil Pengolahan Uji Validitas .....	101
Gambar 6 Proses Penyebaran dan Pengisian Kuisisioner .....	105
Gambar 7 Kebun Kopi .....	106
Gambar 8 <i>Glamour Camping</i> di EkowisataSolok Radjo .....	106
Gambar 9 Kios Makanan .....	107
Gambar 10 Produk Kopi dan Rempah dari Solok Radjo .....	107
Gambar 11 Pemandangan Sekitar Ekowisata Solok Radjo .....	108
Gambar 12 Foto Bersama Staff Ekowisata Solok Radjo .....	108

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Luas Perhutanan Sosial di Sumatera Barat Per Skema Per Maret 2022 .....	21
Tabel 2.	Kisi – kisi penelitian .....	45
Tabel 3	Batas Geografis Kecamatan Lembah Gumanti.....	49
Tabel 4	Karakteristik Masyarakat Sekitar Hutan Kemasyarakatan Solok Radjo .....	57
Tabel 5	Distribusi data yang menjawab benar pada indikator hutan .....	61
Tabel 6	Distribusi data yang menjawab benar pada bagian Perhutanan Sosial .....	63
Tabel 7	Distribusi data yang menjawab benar pada bagian Hutan Kemasyarakatan .....	65
Tabel 8	Distribusi data yang menjawab benar pada bagian Pendapatan .....	67
Tabel 9	Tingkat Pengetahuan Masyarakat Perindikator .....	68
Tabel 10	Persentase Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Perhutanan Sosial .....	69
Tabel 11	Hasil <i>Paired Sample T-Test</i> .....	71
Tabel 12	Hasil Pengolahan Uji Reliabilitas .....	102
Tabel 13	Hasil Pengolahan Kuisisioner Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perhutanan Sosial. ....	103
Tabel 14	Pendapatan Masyarakat Perbulan Sebelum dan Setelah Adanya Perhutanan Sosial . ....	104



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Hutan merupakan wilayah dan bagian dari siklus lingkungan hidup yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dunia yang kita diami, sebab hutan merupakan wilayah di bumi yang mengatur keseimbangan ekosistem. (Wiriadinata, 2012). Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan lebat terbentuk sekitar 250 juta tahun yang lalu, jauh sebelum manusia purba ada. Sedangkan manusia purba hidup 3 juta tahun yang lalu. Vegetasi bumi berbeda dari benua ke benua, dari daerah ke daerah, malahan dari tempat ke tempat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan temperatur udara, curah hujan, kelembaban udara, kelembaban tanah keadaan fisik tanah, kondisi kesuburan tanah dan lain-lain. (Sagala, 1994).

Pengembangan ekonomi fungsi hutan menghadapi kendala tertentu dalam mengelola multifungsi: rapuhnya ekosistem dan kendala geografis yang membatasi akses. Aspek utama yang mempengaruhi kinerja hutan adalah ketersediaan infrastruktur, menyoroti pentingnya dalam memungkinkan pengelolaan hutan multifungsi. Berkaitan dengan itu, perlu dirancang, dikembangkan, dan dikelola infrastrukturnya dengan

mempertimbangkan nilai dan fungsi yang disediakan hutan. (Houballah, Cordonnier, & Mathias, 2020)

Dalam Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: Solusi Konflik, Pengentasan Kemiskinan dan Penyelamatan Habitat dan Perlindungan Keragaman Hayati di buku Hutan Untuk rakyat jalan terjal Performa Agraria di Sektor Kehutanan, kerusakan sumber daya hutan di Indonesia disebabkan oleh dua hal pokok, kemiskinan (*poverty*) dan keserakahan (*greediness*). Kemiskinan disebabkan oleh rendahnya akses masyarakat untuk mengelola lahan. Keserakahan disebabkan oleh kebijakan yang lebih pro pada pelaku ekonomi skala besar. Pengalaman selama 35 tahun lebih model pengusahaan hutan dengan sistem HPH dan HTI menunjukkan fakta tersebut. Masyarakat di sekitar hutan yang hutannya dieksploitasi (secara mekanis-komersil) tidak pernah bertambah taraf kehidupannya secara memadai. Saat ini, lahan kritis dan lahan eks HPH menjadi "tanah tak bertuan" atau open access mencapai 40 juta hektar. Penyebab kegagalan pengelolaan hutan ini menurut Handadari (2013) adalah penebangan kayu yang berlebihan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan, konversi hutan untuk kepentingan non kehutanan, penambangan merial, kelemahan penegarakan hukum dan budaya korupsi di semua pihak. (Handadari, 2013 dalam (Wiranto, 2014)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 sampai dengan 2024 bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, pemerataan serta Indonesia yang berkelanjutan dapat mencapai status pendapatan menengah ke atas. RPJMN Indonesia 2020 hingga 2024 memiliki tujuh agenda pembangunan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Keutanan terlibat langsung setidaknya empat dari tujuh agenda yang ada, (Nurofiq, Prihanto, & dkk, 2020) yaitu:

Penguasaan ekonomi ketahanan untuk pertumbuhan yang berkualitas dan adil.

Mengembangkan daerah untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan kekayaan yang merata.

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).
2. Pengembangan lingkungan dan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim yang tak terduga.

Sebagai bagian dari upaya global, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan bagiannya dibawah Perjanjian Paris dan menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaannya secara *Nationally Determined Contribution* (NDC), termasuk aspek mitigasi dan adaptasi. (Nurofiq, Prihanto, & dkk, 2020)

Untuk mengurai kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan, sesuai yang tercantum dalam pertimbangan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial Pasal 1 pengertian dari perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan pengelolaan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan

kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Hutan.

Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah keniscayaan yang harus dijalankan pemerintah karena beberapa alasan. Pertama, di dalam dan sekitar kawasan hutan ada  $\pm 32.447.851$  jiwa, jumlah desa di dalam hutan  $\pm 2.037$  desa dan di sekitar hutan  $\pm 19.247$  desa (BPS, 2015). Kedua, sebagian besar masyarakat sekitar hutan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Ketiga, sebagian besar luas wilayah Indonesia (63,04%) berupa hutan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Ekspansi lahan pertanian yang paling mudah dan murah adalah masuk ke dalam kawasan hutan. (Ekawati, Suharti, & Anwar, 2020).

Perhutanan Sosial didefinisikan sebagai “inisiatif, ilmu, kebijakan, institusi, dan proses yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam mengatur dan mengelola sumber daya hutan (RECOFTC, 2013 dalam Gilmour, 2016). Dalam Perhutanan Sosial terdapat tiga prinsip utama yaitu hak (*right*), mata pencaharian (*livelihood*), dan konservasi (*conservation*) (Maryudi dkk, 2012). Ketiga prinsip tersebut harus menjadi perhatian untuk memastikan implementasi Perhutanan Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat tetap menjaga kelestarian hutan. Program Perhutanan Sosial juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan bangsa dalam aspek keadilan, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, menyelesaikan konflik tenurial, meningkatkan ketahanan pangan dan iklim, serta mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Supriyanto, 2019).



Kebijakan Perhutanan Sosial juga harus dapat diadaptasikan sesuai dengan kondisi biofisik, sosial, ekonomi, budaya, dan politik lokal. Karakteristik masyarakat sekitar hutan tidaklah seragam. Pembagian masyarakat dalam beberapa tipologi sangat diperlukan untuk memastikan skema Perhutanan Sosial yang dipilih sesuai dengan karakter sosio-ekologis setempat. (Ekawati, Suharti, & Anwar, 2020)

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PSKL, KLHK), realisasi izin Perhutanan Sosial sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 4.048.376,82 hektar. Untuk meningkatkan capaian dan keberhasilan program Perhutanan Sosial, implementasi skema Perhutanan Sosial diarahkan dari pendekatan partisipasi menuju ke pendekatan inklusi. Pada tahap selanjutnya, pendekatan inklusi juga perlu ditingkatkan ke arah pendekatan adaptif di mana dinamika kebutuhan dan kapasitas masyarakat harus mampu beradaptasi secara timbal-balik dengan kapasitas ekologis maupun ekonomi sumber daya hutan (Suharti, 2019).

Program hutan kemasyarakatan menurut pemerintah dapat menjadi solusi dalam merehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak dan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian dan pendapatan masyarakat yang sangat menggantungkan hidupnya terhadap keberadaan hutan, dengan kata lain jika perambah atau masyarakat di sekitar kawasan hutan memiliki kehidupan yang lebih sejahtera, maka kerusakan hutan akibat dari perambahan dapat berkurang.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan nya melalui penyebaran kapasitas dan pemberian akses dan pemanfaatan

sumberdaya hutan secara optimal adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga Pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Sejak 2010 sampai dengan Januari 2014 Hutan Kemasyarakatan telah mendapatkan Pencadangan Areal Kerja (PAK) dari Menteri Kehutanan seluas 311.487 hektar, yang akan memberikan manfaat pada 822 Gapoktan/Koperasi, yang memiliki anggota sebanyak 77.555 KK. Apabila 1 KK terdiri dari 5 jiwa, sebanyak 387.775 jiwa akan kena dampak positif dari prngrmbangan Hkm ini. (Wiranto, 2014)

Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti memiliki komoditas utama kopi dan palawija, namun terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya lokasi tanaman atau APL (Area Penggunaan Lain) sebagai media bercocok tanam. Maka dari itu sulit adanya perkembangan di Nagari Air Dingin serta lahan yang didominasi oleh Hutan Negara yaitu Hutan Lindung (HL) dan juga Hutan Produksi (HP). Dengan melihat adanya peluang dan kesempatan untuk melakukan pengembangan serta jalan keluar dari hambatan yang terdapat pada wilayah ini dengan mengusulkan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan.

Koperasi Produsen Serba Usaha Solok Rajo atau lebih dikenal dengan Hutan Kemasyarakatan Solok Radjo dengan nomor SK.5879/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 yang terletak di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok memiliki luas 3200 Hektar serta mendapatkan izin Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan pada tanggal 27 Oktober 2017.

Dengan adanya program Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan di wilayah Nagari Air Dingin ini diharapkan dapat mencapai pengembangan dari

berbagai aspek muali dari pertanian baik kopi dan palawija, kawasan wisata dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan.

Untuk melihat apakah hutan kemasyarakatan mampu menjadi solusi dalam mengatasi pendapatan masyarakat sekitar hutan penelitian mengenai Dampak Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan Kemasyarakatan (HKm) Solok Radjo di Kecamatan Lembah Gumanti. Parameter yang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat tersebut melalui pemberian izin terhadap keberadaan perhutanan sosial dalam bentuk hutan kemasyarakatan yaitu berupa pendapatan masyarakat sekitar hutan baik sebelum berlakunya izin hutan kemasyarakatan maupun setelah berlakunya izin hutan kemasyarakatan, serta pengetahuan masyarakat mengenai perhutanan sosial dan juga pengaruhnya terhadap masyarakat, jenis usaha yang ada dan juga nilai ekonomi produk dari hutan kemasyarkatan itu sendiri.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pada penelitian sebagai berikut:

1. Komoditas utama wilayah ini adalah kopi dan palawija
2. Kenagarian Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dikelilingi oleh hutan produksi dan hutan lindung
3. Kurangya Area Penggunaan Lain atau area untuk bercocok tanam

## **1.3. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini dimulai dari lokasi penelitian di wilayah Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti yang melibatkan masyarakat yang terdaftar sebagai anggota HKm Solok Radjo, serta pengaruh pemeberian izin serta

pengetahuan terhadap perhutanan sosial, pendapatan masyarakat di sekitar Hutan Kemasyarakatan Solok Radjo.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan Solok Radjo di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Bagaimana pengaruh pemberian izin Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar hutan?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk melihat pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) Solok Radjo Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
2. Untuk menganalisis pengaruh pemberian izin Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan memberikan dampak pada pendapatan masyarakat sekitar HKm Solok Radjo.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan bukti mengenai pengaruh Perhutanan Sosial lebih tepatnya dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan di sekitar Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Solok Radjo
2. Dapat menjadi informasi untuk Dinas Kehutanan dan instansi lainnya.

3. Dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu khususnya didalam kajian mengenai Perhutanan.
4. Dapat bermanfaat sebagai acuan atau referensi studi literatur mahasiswa Universitas Negeri Padang pada penelitian serupa lainnya.